

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2023**









**BADAN  
KESATUAN  
BANGSA DAN  
POLITIK**

**JL. A.  
MAPPANYUKKI,  
KABUPATEN  
BONE**



# *DAFTAR ISI*

	<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>BAB I</b>
	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>BAB II</b>
	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>BAB III</b>
	<b>PENUTUP</b>	<b>BAB IV</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone. Lebih jauh laporan ini juga disusun dengan tujuan untuk melihat sejauh mana kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dan dicapai oleh Badan Kesbangpol pada Tahun Anggaran 2023.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasayng akan datang bagi seluruh staf di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik Kabupaten Bone



**DR.H. A. SUMARDI SUAIB, MM**



# ***BAB 1***

## PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
2. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISAI
3. DATA UMUM ORGANISASI
4. ISU DAN ASPEK STRATEGIS ORGANISASI



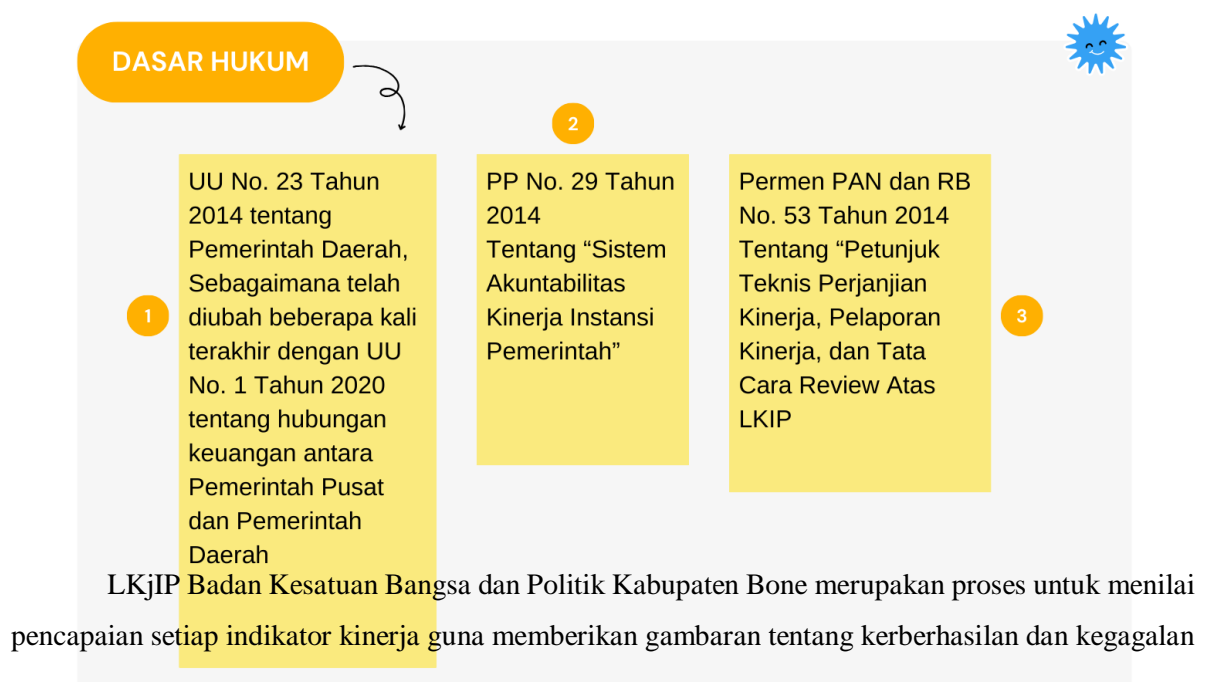
# LATAR BELAKANG

## A. Umum

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut sangat ditentukan oleh target-target yang tertuang dalam perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja di setiap tahunnya.

Penilaian dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. LKjIP Tahun 2023 adalah untuk menginformasikan mengenai rencana kerja dan capaian kinerja pegawai Bakesbangpol Kabupaten Bone Tahun 2023. Berikut dasar hukum yang menjadi dasar penyusunan Laporan KinerjaInstansi(LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:”



pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **B. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka Badan kesatuan bangsa dan Politik mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan Bangsa dan Politik berada pada aturan peralihan yang berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah :

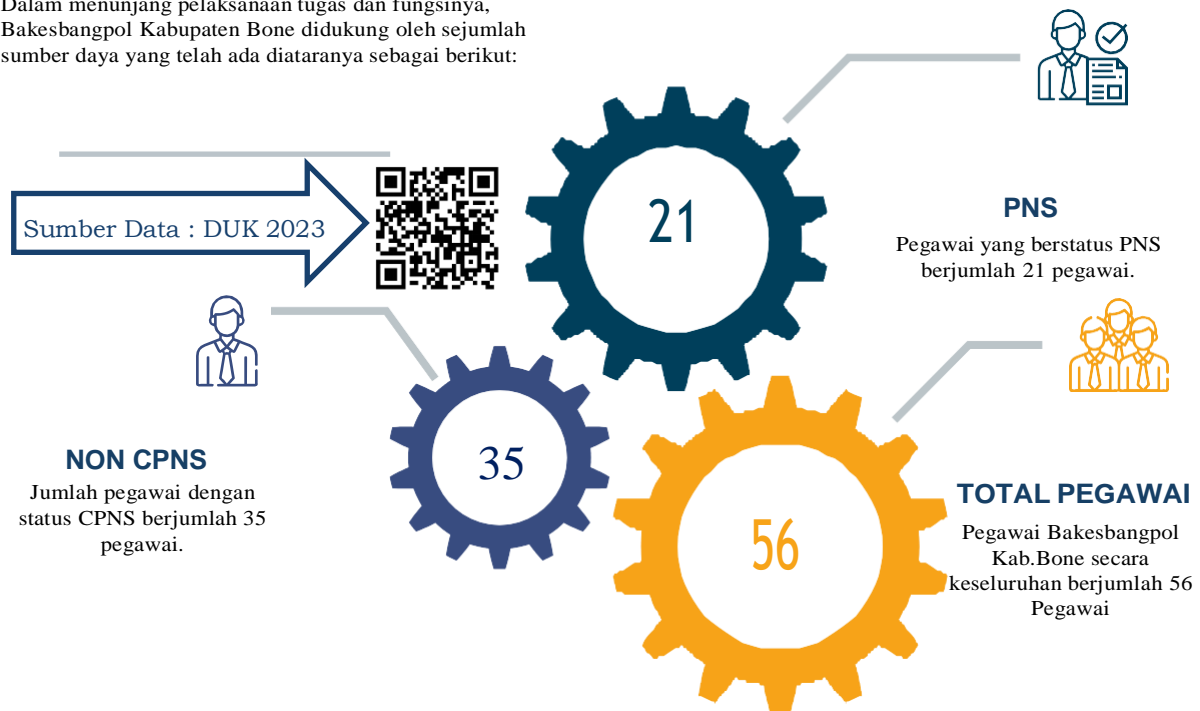
- a. Perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa meliputi pengembangan nilai – nilai kebangsaan, Organisasi Politik dan Kemasyarakatan dan Ketahanan Nasional.
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan Kesatuan Bangsa meliputi pengembangan nilai – nilai Kebangsaan, Organisasi Politik dan Kemasyarakatan serta Ketahanan Nasional.
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang Kesatuan Bangsa meliputi pengembangan nilai – nilai kebangsaan, organisasi politik dan kemasyarakatan, serta ketahanan nasional
- d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Sumber Daya Bakesbangpol Kabupaten Bone

a. Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)

**PERSONIL/PEGAWAI BAKESBANGPOL**

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bakesbangpol Kabupaten Bone didukung oleh sejumlah sumber daya yang telah ada diataranya sebagai berikut:



**Jumlah Sumber Daya Manusia**  
Bakesbangpol Kab. Bone

JABATAN	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	TOTAL	%
1.Eselon II	1	0	1	1,75
2. Eselon III a	1	0	1	1,75
3. Eselon III b	2	2	4	7,17
4. Eselon IV	5	6	11	19,30
5. Fungsional Tertentu	1	1	2	3,51
6. Staff	3	2	5	8,77
7. Tenaga Harian	20	13	33	57,90
<b>Jumlah</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>57</b>	<b>100</b>



### C. Isu Strategis

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone guna pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi sebagai bagian dari Rencana Strategis Pencapaian *Visi Misi Bupati Bone periode tahun 2018-2023*, yaitu untuk mewujudkan *Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing, Dan Sejahtera*, banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek strategis berupa kekuatan dan kelemahan secara internal dan eksternal serta tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi oleh organisasi.

## ISU STRATEGIS

1

Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dan Parpol

2

Meningkatnya Nilai-Nilai Kebangsaan Dalam Kehidupan Beragama dan Bernegara

3

Meningkatnya Antisipasi Konflik Untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

4

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

#### **D. Aspek Strategis Organisasi**

Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab untuk mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang berwawasan kebangsaan, mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bela negara serta mengerti dan mau untuk menggunakan hak hak politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Adapun strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mendukung serta meningkatkan kinerja organisasi adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan dan Pembinaan Ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai -nilai sejarah kebangsaan
2. Penyelenggaraan pendidikan politik bagi elemen masyarakat dan partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman parpol, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita dalam berpolitik dan berorganisasi di masyarakat.  
Pendidikan politik yang dilaksanakan melalui sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan tentang partai politik, penyebaran informasi politik serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada.
3. Pembinaan terhadap ormas dan LSM dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan keanggotaan Ormas dan LSM. Pembinaan terhadap Ormas dan LSM dilakukan dalam bentuk sosialisasi peraturan tentang Ormas untuk meningkatkan pemahaman mengenai pertauran tentang Ormas.
4. Penyelenggaraan dan pembinaan kerukunan beragama
5. Penyelenggaraan kerjasama intelejen keamanan daerah
6. Penanganan konflik sosial
7. Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat
8. Penyelenggaraan dan pengawasan orang asing dan lembaga asing
9. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan fasilitas ketahanan ekonomi , seni, budaya, agama dan kemasyarakatan dan
10. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba(narkotika dan zat adiktif lainnya).



# ***BAB 11***

## PERENCANAAN KINERJA

1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
3. PERJANJIAN KINERJA

## A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

### VISI

---

**“ Masyarakat Bone  
Yang Mandiri,  
Berdaya Saing, dan  
Sejahtera ”**

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023, Visi Pembangunan Kabupaten Bone adalah :

---

### MISI

Berikut rumusan misi upaya - upaya untuk pembangunan daerah yang akan ditempuh oleh Bakesbangpol Kabupaten Bone:

**1**

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

**6**

Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023**

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran			
			Pada Tahun Ke -			
			2020	2021	2022	2023
1	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	47%	52%	57%	62%
		Persentase orpol yang berpartisipasi aktif	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara	6,8	7,8	8,8	9,9
2	Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	B	B	BB	BB

Sumber Data: Renstra Perubahan 2018 – 2023



## B. Strategi dan Arah Kebijakan

#### **a. Strategi**

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah ( strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi pada dasarnya adalah upaya-upaya sistematis dari analisis yang rasional bagaimana sasaran strategik dicapai dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkahlangkah mencapai visi dan misi melalui program prioritas yang sesuai dengankebijakan umum. Untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategi dilakukan dari waktu ke waktu, arah kebijakan membedah kapan indikator capaian masing -masing sasaran harus dicapai. Sekaligus, memandu pada rentang waktu mana strategi harus dijalankan dalam kurun 2018-2023 tersebut.

#### **b. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan memberikan pedoman bagaimana strategi terhubung ke sasaran dan kapan sasaran tersebut harus tercapai. Arah kebijakan diwujudkan dengan fokus atau prioritas capaian dari waktu ke waktu. Program yang disusun nantinya adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari misi, tujuan dan sasaran dimulai dari tahun pertama dimulainya periode RPJMD. Dalam hal ini, beberapa program tetap diteruskan sampai dengan tahun 2023 namun ada juga program yang hanya dilaksanakan dalam satu atau dua tahun. Lingkup arah kebijakan akan mengarah pada tiga aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.



Tabel 2.2

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

VISI : Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera			
MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme ( KKN )			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan tugas pemerintahan dan pembangunan	Peningkatan pelayanan masyarakat melalui peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah
MISI 6 : Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum dan seni budaya dalam kemajuan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi dan mengembangkan nilai - nilai kebangsaan	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Memfasilitasi terlaksananya pendidikan politik sehingga tercipta budaya politik demokratis dan berkesinambungan	Peningkatan pendidikan politik dan partisipasi politik masyarakat
	Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Meningkatkan toleransi antar umat beragama, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bone	Peningkatan toleransi antar umat beragama, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang didukung oleh pemerintah Kabupaten Bone



Sumber Data: Renstra Perubahan Bakesbangpol 2018-2023

### **C. Indikator Kinerja Utama**

IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

### IKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Partisipasi Lembaga kemasyarakatan dan Parpol	Persentase ORMAS/LSM yang Berpartisipasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah Ormas/LSM yang Aktif}}{\text{Jumlah Ormas Keseluruhan Tahun Tersebut}} \times 100 \%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pada Bidang Ketahanan Ekonomis, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase Orpol yang Berpartisipasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah Ormas/Orpol yang aktif Mendapat Pembinaan}}{\text{Jumlah Ormas/Orpol yang Terdaftar}} \times 100 \%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pada Bidang Politik Dalam Negri	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Meningkatnya nilai-nilai Kebangsaan dalam Kehidupan Beragama dan Bernegara	Persentase Lembaga Keagamaan Yang Berperan Aktif	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Keagamaan yang Berperan Aktif}}{\text{Jumlah Lembaga Keagamaan}} \times 100 \%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pada Bidang Ketahanan Ekonomis, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang Bersertifikat Pelatihan Bela Negara	<p>Jumlah Peserta yang telah Bersertifikat Pelatihan Bela Negara</p>  <p><math>\text{X } 100 \%</math></p> <p>Jumlah Aparat &amp; Perwakilan LSM/Ormas</p>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Menjngkatnya Antisipasi Konflik Untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	<p>Jumlah Konflik Sosial yang Tertangani</p>  <p><math>\text{X } 100 \%</math></p> <p>Jumlah Konflik Sosial Keseluruhan</p>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Konflik	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Predikat Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Oleh Inspektorat Kab.Bone	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber Data : Renstra Perubahan Bakesbangpol Tahun 2018-2023

#### D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA PERUBAHAN, RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) 2023, IKU dan APBD. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan PK sebagai berikut:

**Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023**

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	Persen	62	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemsayarakatan	1.817.874.000
	Persentase orpol yang berpartisipasi aktif	Persen	100	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	37.315.199.555
Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	Persen	100	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	77.139.550
	Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara	Persen	9.9	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	908.108.700

Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani	Persen	100	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.958.941.450
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	Predikat	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten /Kota	3.923.642.872
				<b>Jumlah</b>	<b>46.001.626.127</b>

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Perubahan Bakesbangpol Tahun 2023



#### E. Standar Penilaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.5 Standar Penilaian Kinerja**

Nilai %	Pencapaian
110 ke atas	Sangat tercapai/sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$X < 60$	Tidak tercapai/Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$



# ***BAB III***

## AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
2. TARGET DAN REALISASI KINERJA
3. REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA
4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN
5. ANALISIS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
6. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol Kab. Bone adalah perwujudan kewajiban Badan Kesbangpol untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Tahun 2023 diukur berdasarkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Bakesbangpol pada tahun 2023 dan Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Meliputi :

#### TUJUAN/SASARAN DALAM RENSTRA BAKESBANGPOL

MENINGKATNYA PARTISIPASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN PARTAI POLITIK	Persentase Ormas/LSM yang Berpartisipasi Aktif
	Persentase Orpol Yang Berpartisipasi Aktif
MENINGKATNYA NILAI-NILAI KEBANGSAAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA DAN BERNEGARA	Persentase Lembaga Keagamaan yang Berperan Aktif
	Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara
MENINGKATNYA ANTISIPASI KONFLIK UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

## 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja tahun anggaran 2023 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2023 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	Persen	62	62	100	Tercapai /berhasil
	Persentase orpol yang berpartisipasi aktif	Persen	100	100	100	Tercapai /berhasil
Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	Persen	100	100	100	Tercapai /berhasil
	Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara	Persen	9,9	5,7	57	Tidak Tercapai /Tidak Berhasil
Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani	Persen	100	100	100	Tercapai /berhasil
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	Predikat	BB (5)	BB (5)	100	Tercapai /berhasil

<b>Rata – Rata</b>	<b>93% Tercapai/Berhasil</b>
--------------------	----------------------------------

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran tahun 2023

Berdasarkan data diatas, rata – rata capaian kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Mencapai Target (93%). Untuk penjelasan setiap indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Sasaran 1 dengan Indikator 1 “Persentase Ormas/LSM yang Berpartisipasi Aktif” dalam kategori *berhasil*, yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 62% dari target 62%
2. Sasaran 1 indikator 2 “Persentase orpol yang berpartrisipasi aktif ” dalam kategori *berhasil*, yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%
3. Sasaran 2 indikator 1 “Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif” dalam kategori *berhasil*, yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%
4. Sasaran 2 indikator 2 “Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara” dalam kategori *tidak berhasil*, yaitu tercapai 57% dengan realisasi sebesar 5,7% dari target 9,9%
5. Sasaran 3 indikator 1 “Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat” dalam kategori *berhasil*, yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%.
6. Sasaran 4 indikator 1 “capaian indikator Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP” dalam kategori *berhasil*, yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%

## 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matriks sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL 2018	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkat nya partisipasi lembaga kemasyara katan dan parpol	Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	25	25	47	61	71	67	100	100	117	125	100
	Persentase orpol yang berpartripsi pasi aktif	80	80	100	80	100	100	100	100	80	100	100

Meningkatnya nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara	4,5	5,6	6,7	5,7	5,7	5,7	100	100	73	64	57
Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	CC	CC	BB	BB	BB	BB	B	BB	BB	100	100

Sumber Data : Data Capaian Kinerja Diolah oleh Kesbangpol Tahun 2023



Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa Realisasi Kinerja Tahun 2023 bahwa pada

1. Sasaran Pertama dengan Indikator “Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif” dimulai dari tahun 2019-2023 dengan kondisi realisasi kinerja mengalami kenaikan secara signifikan diikuti dengan kenaikan capaian pada tiap tahunnya.
2. Sasaran pertama dengan Indikator “Persentase orpol yang berpartisipasi aktif” pada realisasinya mengalami keadaan fluktuatif pada tiap tahunnya dimulai dari tahun 2019-2023, namun pada capaiannya mengalami kenaikan meskipun ditahun 2021 sempat mengalami penurunan.

3. Sasaran kedua dengan indicator “Persentase Lembaga Keagamaan yang Berperan Aktif” data dari tahun 2019-2023 menunjukkan adanya pemningkatan realisasi pada setiap tahunnya, dan capainnya berada pada keadaan yang stagnan.
4. Sasaran kedua dengan indicator “Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang Bersertifikat Bela Negara” dimana realisasinya dimulai pada tahun 2019-2023 mengalami keadaan yang fluktuatif sehingga capaiannya pun mengalami penurunan tiap tahunnya.
5. Sasaran ketiga dengan indicator “Persentase Konflik Sosial yang Tertangani” realisasi maupun capaiannya dimulai dari tahun 2019-2023 mengalami keadaan yang stagnan.
6. Sasaran keempat dengan indicator “Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP” juga mengalami kenaikan tiap tahunnya pada realisasi maupun capaiannya.

#### **Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI KINERJA					CAPAIAN PERBANDINGAN TARGET JANGKA MENENGAH
			2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	62	25	47	61	71	62	1
	Persentase orpol yang berpartrisipasi aktif	100	80	100	80	100	100	1
Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	100	80	100	100	100	100	1



beragama dan bernegara	Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara	9,9	5,6	6,7	5,7	5,7	5,7	0,57
Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani	100	100	100	100	100	100	1
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	BB	CC	BB	BB	BB	BB	BB

Sumber Data: Laporan Evaluasi Kinerja



Berdasarkan tabel data di atas, dapat dijelaskan bahwa Realisasi Kinerja Tahun 2023 rata-rata telah mengalami peningkatan meskipun pada satu indikator tidak terjadi peningkatan, adapun penjabaran dimasing-masing indikator sebagai berikut :

1. Sasaran Pertama dengan Indikator “Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif” dengan nilai realisasi pada tahun 2023 sebesar 62% yang artinya dalam kondisi **Tercapai/Berhasil**.
2. Sasaran pertama dengan Indikator “Persentase orpol yang berpartisipasi aktif” pada realisasinya ditahun 2023 yakni 100% menunjukkan keadaan yang stagnan dalam kategori **Tercapai/Berhasil**.
3. Sasaran kedua dengan indicator “Persentase Lembaga Keagamaan yang Berperan Aktif” pada realisasinya ditahun 2023 sebesar 100% pun juga telah menunjukkan keadaan yang stagnan dibandingkan dengan tahun lalu yakni **Tercapai/Berhasil**.
4. Sasaran kedua dengan indicator “Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang Bersertifikat Bela Negara” pada tahun 2023 memiliki realisasi sebesar 5,7% dan termasuk dalam kategori **Tidak Tercapai/Tidak Berhasil**.

5. Sasaran ketiga dengan indicator “Persentase Konflik Sosial yang Tertangani” realisasi pada tahun 2023 sebesar 100 % juga telah berada pada keadaan **Tercapai/Berhasil** dari tahun-tahun sebelumnya.
6. Sasaran keempat dengan indicator “Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP” pada realisasinya di tahun 2023 dengan nilai BB atau sama dengan 100% telah **Tercapai/Berhasil**.

#### **4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya Serta Dengan Kabupaten/Kota yang Setara/Sekitar**

Analisa dalam mengukur capaian kinerja tujuan/ sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.4 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal  
/ Standar Nasional Lainnya**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2023	Standar Nasional	
				Target 2023	Realisasi 2023
1	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	62	-	-
		Persentase orpol yang berpartisipasi aktif	100	-	-
2	Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	100	-	-
		Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara	5,7	-	-
3	Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani	100	-	-
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	BB	-	-

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

## **5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	RATA - RATA CAPAIAN %	PREDIKAT			
				>110	90=<s/d<110	60=<s/d<90	<60
				SANGAT BERHASIL	BERHASIL	CUKUP BERHASIL	TIDAK BERHASIL
Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif		100		√		
		100					
	Persentase orpol yang berpartisipasi aktif	100					
Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif		78.5			√	
		100					
	Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara	57					
Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani	100	100		√		

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	100	100		√		
	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>		<b>95</b>		√		

*Sumber Data : Laporan Realisasi Evaluasi Kinerja*

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator tujuan/sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 dalam kategori *Berhasil dan Cukup Berhasil*.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Sasaran 1.1

Dari tabel 3.5 di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran "Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan" dengan jumlah indikator kinerja 2 (dua) yang menunjukkan predikat *Berhasil dan Sangat Berhasil* yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 100%

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

##### a) Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif

**Definisi:** Menggambarkan sejauh mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan monitoring terhadap Ormas/LSM yang telah terdaftar dan tidak terdaftar sehingga dapat berpartisipasi secara aktif.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif dalam kategori *berhasil*, yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 62% dari target 62% hal ini karena:

1. Partisipasi Ormas / LSM yang aktif dalam mendukung penuh setiap kegiatan yang dilakukan oleh bidang Ormas.
2. Dukungan APBD Kab. Bone terhadap Bantuan Dana Hibah kepada Ormas yang ada di Bone.



Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif antara lain:



1. Melakukan Sosialisasi “ Peningkatan ke Aktifan Ormas/LSM
2. Melakukan Sosialisasi tentang “Administrasi Bantuan Hibah Ormas”

**b) Persentase orpol yang berpartisipasi aktif**

**Definisi:** Menggambarkan sejauh mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Partai Politik yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Hibah Parpol.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Persentase orpol yang berpartisipasi aktif dalam kategori *berhasil*, yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% hal ini karena:

1. Terdapat 15 Parpol yang terdaftar.
2. Parpol yang mendapatkan bantuan dana hibah hanya 12 parpol sehingga ada parpol yang tidak aktif.



**Kegiatan Rapat Tim Verifikasi Administrasi Bantuan Partai Politik**



**Kegiatan Pendidikan Politik**

Pencapaian di atas telah mencapai target dibandingkan dengan tahun lalu, namun meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya dikarenakan :

1. Masih terdapat Partai Politik yang tidak berpartisipasi aktif.
  2. Masih terdapat Partai Politik yang tidak mendapatkan bantuan dana hibah.
- Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan Persentase orpol yang berpartisipasi aktif antara lain:
1. Melaksanakan Bimbingan Teknis terkait Bantuan Dana Hibah Parpol
  2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Administrasi Bantuan Dana Hibah Parpol.

## **2) Sasaran 2**

Dari tabel 3.5 di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran “Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara” dengan jumlah indikator kinerja 2 (dua) yang menunjukkan predikat *Berhasil dan Tidak Berhasil* yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 78.5%.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

### **a) Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif**

**Definisi:** Menggambarkan sejauh mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Etnis di Kabupaten Bone.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif dalam kategori *berhasil*, yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% hal ini karena Pemerintah Daerah melalui Bakesbangpol bersinergi, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Lembaga Keagamaan yang terbentuk Forum Kerukunan antar Umat Beragama.



**Rapat Pengurus Harian sekaligus penyerahan SK FKUB**



**Rapat pengurus harian dengan tema Dialog Sosialisasi Moderasi Beragama dan**

Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya adalah Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik untuk meningkatkan Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif dengan Melakukan rapat koordinasi dengan FKUB.

#### **b) Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara**

**Definisi:** Pelaksanaan Pelatihan Bela Negara kepada Aparat Pemerintah Kabupaten yang sudah berlangsung selama 5 Angkatan dengan dengan jumlah keseluruhan yang telah mengikuti Belneg sebanyak 440 orang dalam rangka menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara dalam kategori *Tidak berhasil*, yaitu tercapai 57% dengan realisasi sebesar 5,7% dari target 9,9% hal ini karena:

1. Terjadinya Pandemi Covid-19 di Tahun 2022 dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan Bela Negara pada Tahun 2022 tidak ada sehingga kegiatan dimaksud tidak ada.. sehingga Pelatihan Bela Negara tidak dapat dilaksanakan.



### Kegiatan Pelatihan Bela Negara Dua Tahun Silam

Adapun upaya pencapaian target dikemudian hari, maka perlu adanya hal-hal dibawah ini:

1. Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan bela negara Aparatur dan LSM berpartisipasi aktif dalam mengikuti Pelatihan Bela Negara
2. Semua peserta yang mendapat panggilan untuk pelatihan bela negara bersedia untuk ikut.
3. Memaksimalkan peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan sebagai bentuk Bela Negara secara Virtual.
4. Melaksanakan Pendidikan kesadaran bela negara bagi para siswa SMA dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air.

### 3) Sasaran 3

Dari tabel 3.5 di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran “Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat” dengan jumlah indikator kinerja 1 yang menunjukkan predikat *Berhasil* yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 100%.



Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

**a) Persentase Konflik sosial yang tertangani**

**Definisi:** Menggambarkan sejauh mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan Forkopimda, Forkopimcam dan anggota KOMINDA, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam menangani Konflik Sosial di Kabupaten Bone .

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Persentase Konflik sosial yang tertangani dalam kategori *berhasil*, yaitu tercapai *100%* dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% hal ini karena:

1. Terlaksananya rapat koordinasi dan sinergitas antara Forkopimda Bersama stakeholder terkait dalam membahas permasalahan yang terjadi dan yang akan terjadi.
2. Terlaksananya rapat koordinasi dengan anggota KOMINDA.
3. Terlaksananya rapat koordinasi Forkopimda Bersama Forkopimcam dalam pembahasan permasalahan permasalahan di daerah.



**Kegiatan Rapat Forkopimda**



**Rapat Koordinasi  
FORKOPIMDA Bersama  
FORKOPIMCAM**



**Rapat Kominda**

Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Masih kurangnya prasarana dalam pelaksanaan monitoring ke desa desa terpencil dalam hal menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
2. Terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan koordinasi tersebut.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik untuk meningkatkan Persentase Konflik sosial yang tertangani.

1. Melakukan Koordinasi dan sinergitas antara Forkopimda, Forkopimcam dan KOMINDA serta Tokoh Agama dan Toko Masyarakat
2. Melakukan Rapat – Rapat Internal dengan Staceholder terkait.

#### **4) Sasaran 4**

Dari tabel 3.5 di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik” dengan jumlah indikator kinerja 1 yang menunjukkan predikat Sangat *Berhasil* yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 100%.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

##### **a) Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP**

**Definisi:** Menggambarkan sejauh mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan perbaikan laporan akuntabilitas yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Bone.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP dalam kategori *berhasil*, yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% hal ini karena:

1. Tersedianya data yang dibutuhkan oleh tiim Audit Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja
2. Tersajinya laporan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Koordinasi dan asistensi dengan semua Perangkat Daerah



### Kegiatan Pencapaian Nilai Evaluasi SAKIP

Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai
2. Belum tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan pelaporan kinerja pemerintah

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik untuk meningkatkan Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP.

1. Mempersiapkan perencanaan kegiatan dengan lebih baik lagi sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 dapat berjalan dengan lebih baik dan seluruh anggaran dapat direalisasikan
2. Perlu adanya penyeragaman pandangan terhadap regulasi yang digunakan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan di daerah;
3. Diklat – diklat perlu diperbanyak sehingga SDM yang berkompetensi dapat diwujudkan

### 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel

untuk menganalisis efisiensi sumber daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan

**Tabel 3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI SUMBER DAYA
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)	%
a	b	c	D	e (d/c x100%)	f	g	h (g/f x 100%)	i (e-h)
Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	62	62	100	1.817.874.000	1.654.576.578	91	9
	Persentase orpol yang berpartisipasi aktif	100	100	100	37.315.919.555	37.294.084.510	99	1
Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	100	100	100	77.139.550	74.945.350	97	3
	Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara	9,9	5,7	57	908.108.700	905.814.925	99	-42
Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani	100	100	100	1.958.941.450	1.904.109.864	97	3
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	BB (5)	BB (5)	BB (100)	3.923.642.872	3.603.684.643	91	9
<b>Rata-Rata Capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya</b>							<b>96%</b>	

Sumber Data : Realisasi Anggaran Tahun 2023

Berdasarkan hasil Analisa efisiensi penggunaan sumber daya ( anggaran ) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan





kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu :

1. Indikator Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 91% menunjukkan bahwa efisiensi sumber daya sebesar 9 %.
2. Indikator Persentase orpol yang berpartisipasi aktif dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 99% menunjukkan bahwa efisiensi sumber daya sebesar 1 %.
3. Indikator Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 97% menunjukkan bahwa efisiensi sumber daya sebesar 3 %.
4. Indikator Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara dengan capaian kinerja 575% dan capaian anggaran 99% menunjukkan bahwa efisiensi sumber daya sebesar -42%.
5. Indikator Persentase Konflik sosial yang tertangani dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 97% menunjukkan bahwa efisiensi sumber daya sebesar 3%.
6. Indikator Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP dengan capaian kinerja BB(100) dan capaian anggaran 91% menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 2% dan efisiensi sumber daya sebesar 9%.

*“PERATURAN MENTRI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214/PMK.02/2017 TENTANG PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA”*

Pengukuran efesiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

### 7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif							
		Persentase orpol yang berpartisipasi aktif							
2	Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif							
		Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara							

3	Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani							
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP							
	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik</b>	<b>Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan realiasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan ( % )</b>	%	100	100	100	
			<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bakesbangpol yang tersusun</b>	%	100	100	100	
			<b>SUB KEGIATAN</b>						
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100	Tetap mengikuti tahapan dalam perencanaan sehingga kegiatan tetap berjalan dengan baik

			2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	100	Tetap mengikuti tahapan dalam perencanaan sehingga kegiatan tetap berjalan dengan baik
			3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100	Tetap mengikuti tahapan dalam perencanaan sehingga kegiatan tetap berjalan dengan baik
			4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100	Tetap mengikuti tahapan dalam perencanaan sehingga kegiatan tetap berjalan dengan baik
			5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	100	Tetap mengikuti tahapan dalam perencanaan sehingga kegiatan tetap berjalan dengan baik
			<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>	
			<b>SUB KEGIATAN</b>						
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	24	21	87,5	Tetap memperhatikan tahapan waktu yang telah diberikan

			<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Aparat Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
			<b>SUB KEGIATAN</b>						
			1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	57	57	100	Tetap memperhatikan kesesuaian pagu dengan pengadaan pakaian dinas
			<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	
			<b>SUB KEGIATAN</b>						
			1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	Tetap memperhatikan pelaksanaan dan kesesuaian didalam setiap subnya
			2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	Tetap memperhatikan pelaksanaan dan kesesuaian didalam setiap subnya

			3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100	Tetap memperhatikan pelaksanaan dan kesesuaian didalam setiap subnya
			4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	Dokumen	12	12	100	Tetap memperhatikan pelaksanaan dan kesesuaian didalam setiap subnya
			5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	600	694	115	Tetap memperhatikan pelaksanaan dan kesesuaian didalam setiap subnya
			<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
			<b>SUB KEGIATAN</b>						
			1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	48	100	Memperhatikan pelaksanaan pembayaran pada sub kegiatan ini

			2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	Memperhatikan pelaksanaan pembayaran pada sub kegiatan ini
			<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	100	100	
			<b>SUB KEGIATAN</b>						
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	22	22	100	Memperhatikan pelaksanaan pembayaran pada sub kegiatan ini
			2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	27	27	100	Memperhatikan pelaksanaan pembayaran pada sub kegiatan ini
2	Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara	<b>PROGRAM : Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Presentase Peningkatan Kemitraan Pengembangan Ideologi Wawasan Kebangsaan ( % )</b>	%	90	100	111	

			<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase Hasil Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa</b>	%	90	100	111	
			<b>SUB KEGIATAN</b>						
			1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	4	4	100	Diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan
			2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	1	1	100	Diharapkan dapat terlaksanakan sesuai dengan jadwal perencanaan
			3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	9	9	100	dlharapkan kedepannya kegiatan ini dapat terlaksana setelah pandemi covid-19 berakhir



			4. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	1	1	100	Diharapkan dapat terlaksanakan sesuai dengan jadwal perencanaan
3	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Persentase orpol yang berpartisipasi aktif	<b>PROGRAM : Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>Persentase Peran Parpol dan Masyarakat dalam Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%)</b>	%	100	100	100	
			<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Persentase Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	%	100	100	100	
			<b>SUB KEGIATAN</b>						

			1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang Disusun	Dokumen	2	2	100	Tetap memperhatikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan pembagian pagu sesuai dengan kesepakatan bersama
			2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Didaerah yang Disusun	Dokumen	1	1	100	Tetap memperhatikan jadwal pelaksanaan agar dapat terlaksanan sesuai dengan time line yang ada
			3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemlihan Umum/Pemlihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Didaerah	Laporan	1	1	100	Diharapkan peserta parpol dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pendaftaran parpol

	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Persentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	PROGRAM : Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang ikut serta dalam Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)	%	85	100	117	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	85	100	117	
			SUB KEGIATAN						
			1. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	1	1	100	Diharapkan kedepannya ormas bisa diberikan sosialisasi terkait kelengkapan berkas permohonan dana bantuan hibah
	Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	PROGRAM: PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	%	90	100	111	
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	90	100	111	
			SUB KEGIATAN						

			1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	9	9	100	Tetap mempertahankan jadwal pelaksanaan agar terlaksana sesuai dengan time line yang ada
			2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	4	4	100	Tetap mempertahankan jadwal pelaksanaan agar terlaksana sesuai dengan time line yang ada
4	Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Konflik sosial yang tertangani	<b>PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial (%)</b>	%	90	100	111	
			<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Persentases Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	%	90	100	111	
			<b>SUB KEGIATAN</b>						

			1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	100	Tetap menjaga kesesuaian jadwal pelaksanaan dengan pelaksanaan yang ada di lapangan
			2. Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	100	Diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya

			3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	12	12	100	Diharapkan dapat terlaksanan dengan baik
			4. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100	Diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya

Tabel 3.7 Analisis Program /Kegiatan /Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

*Sumber Data : Laporan Kinerja Pemerintah*

### **Upaya Perbaikan Berikutnya**

- a. Mempersiapkan perencanaan kegiatan dengan lebih baik lagi sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 dapat berjalan dengan lebih baik dan seluruh anggaran dapat direalisasikan;
- b. Komunikasi dan koordinasi antar pemegang puncak pimpinan perlu ditingkatkan sehingga gangguan dari kebijakan politik dapat ditekan sekecil-kecilnya;
- c. Perlu adanya penyeragaman pandangan terhadap regulasi yang digunakan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan di daerah;
- d. Diklat – diklat perlu diperbanyak sehingga SDM yang berkompetensi dapat diwujudkan.

1) **Sasaran pertama “Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dan Parpol”** berikut upaya perbaikan :

- a. Melakukan Sosialisasi “ Peningkatan ke Aktifan Ormas/LSM
- b. Melakukan Sosialisasi tentang “Administrasi Bantuan Hibah Ormas”
- c. Melaksanakan Bimbingan Tekhnis terkait Bantuan Dana Hibah Parpol
- d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Administrasi Bantuan Dana Hibah Parpol.

2) **Sasaran kedua “Meningkatnya Antisipasi Konflik untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat”** berikut upaya perbaikannya :

- a. Melakukan Koordinasi dan sinergitas antara Forkopimda, Forkopimcam dan KOMINDA serta Tokoh Agama dan Toko Masyarakat
- b. Melakukan Rapat – Rapat Internal dengan Staceholder terkait.

3) **Sasaran Ketiga “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik”**, upaya perbaikan:

- a. Mempersiapkan perencanaan kegiatan dengan lebih baik lagi sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 dapat berjalan dengan lebih baik dan seluruh anggaran dapat direalisasikan
- b. Perlu adanya penyeragaman pandangan terhadap regulasi yang digunakan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan di daerah;
- c. Diklat – diklat perlu diperbanyak sehingga SDM yang berkompetensi dapat diwujudkan

### **B. Realisasi Anggaran**

Pagu anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Tahun 2023 setelah perubahan sebesar **Rp. 46,001,626,127,-** (Empat puluh enam milyar seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 7.2 Realisasi Anggaran**

URAIAN	JUMLAH		PERSEN
	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4
Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol			
Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara			
Meningkatnya antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat berbasis teknologi informasi			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik			
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.817.874.000	1.654.576.578	91
Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	37.315.919.555	37.294.084.510	99
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	77.139.550	74.945.350	97
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	908.108.700	905.814.925	99
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.958.941.450	1.904.109.864	97
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone	3.923.642.872	3.603.684.643	
<b>TOTAL</b>	<b>46.001.626.127</b>	<b>8.959.749.668</b>	<b>19%</b>





# ***BAB IV***

PENUTUP

1. KESIMPULAN
2. SARAN

LAMPIRAN

## A. Simpulan Umum

Secara umum, kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2023 adalah **Berhasil** dan memiliki kondisi yang stabil dengan tahun sebelumnya, karena ada dua Sasaran memenuhi kriteria **Berhasil**, dan masing-masing indikator lainnya memenuhi kriteria **Berhasil** dan **Tidak Berhasil**. Untuk ketiga sasaran yakni sasaran Pertama dengan “Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dan Parpol”, sasaran ketiga yakni “Meningkatnya Antisipasi Konflik untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat” dan Sasaran keempat yakni “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik” berada pada predikat **Berhasil**. Sedangkan untuk sasaran kedua “Meningkatnya nilai-nilai Kebangsaan dalam Kehidupan Beragama dan Bernegara” mendapat predikat **Tidak Berhasil**. Sehingga rata-rata pencapaian Kinerja yang diperoleh Badan Kesbangpol pada tahun 2023 termasuk dalam kategori “**Berhasil**”

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, LKJIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKJIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

## B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga sebagai bagian dari kebijakan strategis daerah, khususnya dalam RENSTRA dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan Sub Kegiatan, alokasi anggarannya, juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan dan Sub. Kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk pelayanan yang memperoleh beberapa penghargaan oleh Pemerintah.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol dalam memperoleh predikat disetiap sarannya yakni :

1. Untuk sasaran pertama “Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dan Parpol” dan Sasaran keempat yakni “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik” berada pada predikat **Berhasil**. Dalam mewujudkannya kendala yang dihadapi yakni:

- a. Masih terdapat Ormas/LSM yang belum memiliki Surat Keterangan Terdaftar ( SKT )
- b. Masih ada Ormas / LSM yang belum mampu menunjukkan surat domisi keberadaan sekretariat.
- c. Masih terdapat Partai Politik yang tidak berpartisipasi aktif.
- d. Masih terdapat Partai Politik yang tidak mendapatkan bantuan dana hibah.
- e. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai
- f. Belum tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan pelaporan kinerja pemerintah

Untuk upaya dalam pencapaiannya yakni:

- e. Melakukan Sosialisasi “ Peningkatan ke Aktifan Ormas/LSM
  - f. Melakukan Sosialisasi tentang “Administrasi Bantuan Hibah Ormas”
  - g. Melaksanakan Bimbingan Tekhnis terkait Bantuan Dana Hibah Parpol
  - h. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Administrasi Bantuan Dana Hibah Parpol.
  - i. Mempersiapkan perencanaan kegiatan dengan lebih baik lagi sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 dapat berjalan dengan lebih baik dan seluruh anggaran dapat direalisasikan
  - j. Perlu adanya penyeragaman pandangan terhadap regulasi yang digunakan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan di daerah;
  - k. Diklat – diklat perlu diperbanyak sehingga SDM yang berkompetensi dapat diwujudkan
2. Sasaran Ketiga “Meningkatnya Antisipasi Konflik untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat” dengan predikat **Berhasil**, hambatan dalam pelaksanaannya adalah :
- a. Masih kurangnya prasarana dalam pelaksanaan monitoring ke desa desa terpencil dalam hal menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
  - b. Terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan koordinasi tersebut.
- Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik untuk meningkatkan Persentase Konflik sosial yang tertangani.

- c. Melakukan Koordinasi dan sinergitas antara Forkopimda, Forkopimcam dan KOMINDA serta Tokoh Agama dan Toko Masyarakat
  - d. Melakukan Rapat – Rapat Internal dengan Staceholder terkait.
3. Sasaran kedua “Meningkatnya nilai-nilai Kebangsaan dalam Kehidupan Beragama dan Bernegara” mendapat predikat **Tidak Berhasil**. Hal ini disebabkan oleh kendala yang dihadapi adalah :

Kurangnya sarana dan prasaran yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini.


Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik untuk meningkatkan Persentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif dengan Melakukan rapat koordinasi dengan FKUB.

Hal ini juga diperparah oleh salah satu Indiktor pada sasaran ini yakni “**Persentase Aparatur dan Perwakilan LSM/Ormas yang bersertifikat Pelatihan Bela Negara**” yang selama dua tahun terakhir tidak berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan:

- a. Terjadinya Pandemi Covid-19 di Tahun 2022 dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan Bela Negara pada Tahun 2022 tidak ada sehingga kegiatan dimaksud tidak ada, sehingga Pelatihan Bela Negara tidak dapat dilaksanakan
- Namun, untuk mengatasinya, hal yang perlu dilakukan adalah :
- a. Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan bela negara Aparatur dan LSM berpartisipasi aktif dalam mengikuti Pelatihan Bela Negara
  - b. Semua peserta yang mendapat panggilan untuk pelatihan bela negara bersedia untuk ikut.
  - c. Memaksimalkan peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan sebagai bentuk Bela Negara secara Virtual.
  - d. Melaksanakan Pendidikan kesadaran bela negara bagi para siswa SMA dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 merupakan laporan tahunan. Berdasarkan masalah dan isu strategis untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya *good governance* serta meningkatkan kinerja Bakesbangpol Kab. Bone dimasa akan datang, perlu dirumuskan bersama indikator sasaran yang menjadi tolak ukur kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bakesbangpol Kab. Bone priode tahun 2018-2023.

**Lampiran :**

- 1). Renstra Perubahan 2018-2023
- 2). Cascading Kinerja
- 3). Perjanjian Kinerja
- 4). Pengukuran Rencana Aksi
- 5). Capaian Kinerja
- 6). IKU
- 7). Pohon Kinerja
- 8). Rencana Aksi
- 9). Renja
- 10). Iku Kabupaten → 
- 11). Lampiran lainnya, dll.